

**PEMANFAATAN ALOKASI APBD OLEH BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH JAKARTA SMART CITY DALAM
PENGEMBANGAN APLIKASI JAKARTA KINI
SELAMA MASA PANDEMI
(STUDI KASUS TAHUN ANGGARAN 2021)**

Radito Prayogo

**DEPARTEMEN POLITIK DAN PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
DIPONEGORO**

Jl. Prof. H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269 Telepon (024)
7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www/fisip.undip.ac.id>

email fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

Jakarta Kini (Jaki) application was developed as a public service super application which aims to simplify the public service process from various government sectors, especially during the Covid-19 pandemic. The pandemic has resulted in an increase in the budget allocation for the DKI Jakarta Provincial Government in the technology sector, especially in this case for the Regional Public Service Agency (BLUD) Jakarta Smart City, which one of their main projects is the development of the Jakarta Kini Application (Jaki). Therefore, this research aims to analyze how the abundant allocation is utilized in developing the DKI Jakarta public service super application, the Jakarta Kini Application (Jaki).

To facilitate the analysis in this research, the theory used to analyze this research is the e-government theory by the Harvard JFK School of Government, where according to this theory there are three important aspects that must be present in applying the concept of digitalization in the public sector, including support (support), capacity (capacity), and value (value), using qualitative descriptive methods with data gathering techniques through interviews and documentation to study the use of the DKI Jakarta Regional Budget Allocation (APBD) in the development of the Jakarta Kini (Jaki) Application by BLUD Jakarta Smart City.

The research results show that in terms of capacity, Jakarta Smart City has strong financial and human resources quality to develop the Jaki Application.

However, support from the DKI Jakarta Provincial Government in terms of bureaucracy aspect is still lacking, especially because it is too focused on KSD (Regional Strategic Activities) which are the activities that intended to fulfil the Governor and Vice Governor's Work Promise for the 2017 – 2022 Anies Baswedan – Sandiaga Uno working period and are part of the DKI Jakarta RPJMD (Regional Medium Term Development Plan) 2017 – 2022. This lack of support impact the value felt by the people of Jakarta. Even though some people feel the benefits of the Jaki Application, many do not, which can be seen in the user rating of the Jaki Application on the Google Playstore platform, which has an average rating of 3.7 out of 5 and many negative comments from users. This shows the need to increase bureaucracy support on the development of Jaki and focus on improving the app user experience so that the benefits felt by the people of Jakarta can be maximized.

Key words: Regional Budget Utilization, Jakarta Kini Application, e-government

Pendahuluan

Sebagai pusat bisnis, politik, dan kebudayaan, Jakarta merupakan salah satu destinasi urbanisasi terbesar oleh warga daerah-daerah lain di Indonesia sejak jaman orde lama dan orde baru.² Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik DKI Jakarta pada 2021, jumlah penduduk di DKI Jakarta sudah hampir mencapai 11 Juta Penduduk. Faktor-faktor ini melahirkan berbagai permasalahan urban seperti kemacetan, banjir, polusi udara, hingga administrasi kependudukan.

Terlebih lagi di era pandemi Covid-19 ini yang membuat cara hidup masyarakat berubah secara 180 derajat membuat Pemprov DKI Jakarta harus beradaptasi juga dalam urusan tata kelola pemerintahan, khususnya pelayanan publik kepada masyarakat. Berdasarkan paradigma terkini dalam teori pelayanan publik

Denhardt bersaudara, yaitu New Public Services, pemerintah semakin dituntut untuk berkontribusi dalam aspek pelayanan publik terhadap Masyarakat. Salah satu bentuk inovasi pelayanan publik yang sudah dilakukan oleh Jakarta Smart City adalah dengan meluncurkan aplikasi super (Super-App) pelayanan publiknya sendiri pada 2019 yang bernama JAKI (Jakarta Kini). Salah satu masalah utama dalam pelayanan publik secara digital di Jakarta adalah masih belum terintegrasinya aplikasi-aplikasi layanan publik di Jakarta. Terdapat lebih dari 150 jenis layanan publik digital dari berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang masih tersebar dan tidak ada platform yang menyatukan layanan- layanan publik tersebut.

Pandemi Covid-19 memaksa Pemprov DKI Jakarta untuk mengakselerasi transformasi digital dalam pelayanan publik dan lebih

memprioritaskan e-government, dengan menaikkan alokasi anggaran bagi Jakarta Smart City hampir lima kali lipat pada 2021 dibanding 2019, yaitu menjadi sebesar 436,5 Miliar Rupiah. Dengan kenaikan anggaran yang cukup signifikan ini tentu saja diharapkan dapat menghasilkan output yang lebih baik secara signifikan pula oleh Jakarta Smart City, khususnya dalam pengembangan super app pelayanan publiknya yaitu Jaki. Namun walau begitu, kenaikan alokasi anggaran ini sepertinya masih belum sepenuhnya dimaksimalkan oleh BLUD Jakarta Smart City. Pasalnya masih banyak pengguna Aplikasi Jaki yang kurang puas terhadap Jaki, mayoritas dari pengguna yang kurang puas ini dikarenakan kendala teknis pada Aplikasi Jaki seperti server aplikasi yang lambat, atau bug pada aplikasi yang menyebabkan close app secara tiba-tiba. Hal ini dapat dilihat pada halaman Aplikasi Jaki pada platform Google Play Store untuk Android dimana mayoritas Aplikasi Jaki diunduh oleh warga Jakarta. Di Google Play Store Aplikasi Jaki mendapat nilai rata-rata dari pengguna sebesar 3,7 dari 5, dengan nilai 1 merupakan nilai kedua terbanyak dari seluruh pengguna Jakarta Smart City.

Metode Penelitian

Untuk mengetahui secara lebih detail mengenai pemanfaatan Alokasi APBD DKI Jakarta oleh BLUD Jakarta Smart City dalam

pengembangan Aplikasi Jaki selama masa pandemi, metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. penelitian ini dilakukan di Provinsi DKI Jakarta, dengan tempat spesifik dimana penelitian ini dilakukan adalah di kantor dari Jakarta Smart City, BLUD yang mengembangkan aplikasi Jaki yang terletak di Gedung Balai Kota DKI Jakarta. Adapun subjek dari penelitian ini adalah para pengembang dari Aplikasi Jaki yang bekerja di BLUD Jakarta Smart City dan juga Masyarakat DKI Jakarta yang menggunakan Aplikasi Jaki.

Hasil dan Pembahasan

1. Pemanfaatan Alokasi APBD Tahun Anggaran 2021 terhadap Jaki

Dari ketiga jenis Alokasi APBD bagi Jakarta Smart City di tahun anggaran 2021, dua diantaranya lah yang paling banyak digunakan untuk keperluan pengembangan Aplikasi Jaki, yaitu Belanja Modal Peralatan & Mesin dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya. Dari alokasi anggaran sebesar Rp 165.813.599.909,00 untuk Belanja Modal Peralatan & Mesin, sekitar 89,2% atau Rp 147.909.752.144,00 terealisasi. Belanja modal aset tetap lainnya juga terealisasi sekitar 94,22% atau Rp 217.292.894.330 dari total alokasi anggaran Rp 230.622.614.099. Hal ini menunjukkan bahwa

pengembangan Aplikasi Jaki memerlukan biaya yang cukup besar.

Adapun Belanja Modal Peralatan dan Mesin kebanyakan digunakan untuk membelanjakan perangkat keras (*Hardware*), dengan salah satu belanja yang menonjolnya adalah teknologi IoT (Internet of Things) berupa DCP (Alat Control) Sensor sebanyak 664 unit, menghabiskan biaya sekitar 19,9 Miliar. Sensor-sensor itu terpasang di berbagai rumah pompa di DKI Jakarta yang dikolaborasikan dengan teknologi *Cloud Service* yang dapat mengambil data secara real-time. Teknologi ini digunakan untuk memprediksi potensi terjadinya banjir dan membantu dalam pembuatan keputusan dalam waktu cepat mengenai penanganan banjir. Teknologi *Cloud Service* tersebut juga digunakan untuk mengintegrasikan sensor-sensor tersebut kedalam fitur Pantau Banjir dari Aplikasi Jakarta Kini (Jaki), dimana masyarakat juga dapat ikut memantau potensi banjir berdasarkan keadaan-keadaan pintu air dan pompa air di Jakarta.

Adapun untuk Belanja Aset Tetap Lainnya, kebanyakan digunakan untuk membelanjakan perangkat lunak (*software*), dengan salah satu belanja menonjolnya yaitu software atau

lisensi-lisensi Master Data Management, yang menghabiskan biaya sebesar 47,9 Miliar. Master Data Management ini merupakan teknologi Big Data yang digunakan dalam pengembangan fitur Digital ID dari Aplikasi Jakarta Kini. Digital ID ini sendiri mengintegrasikan NIK (Nomor Induk Kependudukan) seluruh warga DKI Jakarta untuk mewujudkan layanan satu pintu. Masyarakat Jakarta dapat mengakses layanan dan informasi yang terpersonalisasi seperti mengakses data keluarga, dokumen kependudukan, dan integrasi lainnya yang berkaitan dengan NIK.

2. Pengembangan Aplikasi Jakarta Kini Berdasarkan KSD (Kegiatan Strategis Daerah)

Kegiatan Strategis Daerah (KSD) merupakan bagian dari Proyek Strategis Nasional yang mendukung Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode 2017–2022 atau merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). KSD merupakan formulasi dalam rangka mewujudkan Jakarta yang “Maju Kotanya, Bahagia Warganya”, yang merupakan visi dari pemerintahan Anies – Sandi, dan dikelompokkan dalam 5 tema

berdasarkan Misi, antara lain yaitu Pembangunan Manusia, Ekonomi & Infrastruktur, Integritas Aparatur, Kota Lestari, dan Simpul Kemajuan.

KSD merupakan indikator capaian juga bagi OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di DKI Jakarta dan tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) setiap tahunnya yang menjadi panduan dalam penyusunan APBD. Landasan hukum dalam pelaksanaan KSD 2021 yaitu Instruksi Sekretaris Daerah No. 1 Tahun 2021 dan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 49 Tahun 2021. Pengembangan Smart City, yang termasuk kedalam tema KSD Peningkatan Integritas Aparatur merupakan yang paling melibatkan BLUD Jakarta Smart City. Di dalam aspek pengembangan Smart City, tertuang ke dalam 13 KSD dengan 5 diantaranya terkait dengan pengembangan Aplikasi Jaki, antara lain yaitu pengayaan fitur Aplikasi Jaki, penyusunan kerangka kerja sama dengan perusahaan rintisan, penyediaan JakWifi, pemutakhiran database bantuan-bantuan sosial, dan Transformasi digital dengan Master Data Management (MDM).

Menurut hasil wawancara dengan Fidan Safira selaku Asisten Manajer Divisi

Analisa Produk Jakarta Smart City, tantangan terbesar dalam pelaksanaan KSD terkait dengan salah satu poin dari kelima KSD untuk Jaki diatas, yaitu pengayaan fitur Aplikasi Jaki. , karena selain poin ke-1 tersebut memang tujuan utama dari dibuatnya Aplikasi Jaki, yaitu untuk mengintegrasikan berbagai jenis layanan publik di DKI Jakarta dalam satu aplikasi, dalam melaksanakan proses integrasi ini tim Jakarta Smart City harus berkolaborasi dengan Organisasi Perangkat Daerah DKI Jakarta lainnya atau bahkan perusahaan- perusahaan privat berupa startup. Menurut yang disampaikan oleh salah satu pegawai dari divisi pengembang Jakarta Smart City ketika rapat koordinasi dengan divisi analisa produk, bahwa dari segi teknis mereka juga mendapati kesulitan, karena belum adanya sebuah sistem daring yang mengintegrasikan layanan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, sehingga setiap SKPD memiliki sistem server nya sendiri-sendiri.

Untuk agenda-agenda KSD di tahun 2021 sendiri seluruhnya berhasil tercapai, terutama untuk kelima poin yang terkait dengan pengembangan Aplikasi Jaki yang sudah disebut diatas. Untuk poin ke-1 KSD sendiri atau yang diutamakan dari pencapaian KSD

dalam pengembangan Aplikasi Jaki yaitu pengayaan fitur aplikasi Jaki yang mengintegrasikan seluruh aplikasi layanan masyarakat Jakarta, sebanyak 18 fitur sudah berhasil terintegrasi ke Aplikasi Jaki di tahun 2021 dari target sebanyak 15, yang mana 3 dari 18 fitur tersebut juga merupakan target dari KSD 2021 dalam urusan pengembangan smart city yang terkait dengan pengembangan Aplikasi Jaki yang sudah disebut diatas, yaitu poin ke 6, 7, dan 9. Ketiga fitur tersebut yaitu fitur JakWifi, Informasi dan Bansos (KJP dan KJMU), dan juga fitur Digital ID. Dikarenakan tahun 2021 ini merupakan puncak pandemi di Indonesia, dari ke-18 fitur yang diintegrasikan ke Aplikasi Jaki di tahun 2021 kebanyakan merupakan fitur di bidang kesehatan.

3. Analisis Pengembangan Aplikasi Jaki di Tahun Anggaran 2021

Untuk menjelaskan dan menggambarkan pemanfaatan alokasi APBD dalam pengembangan Aplikasi Jaki di masa Pandemi Covid-19 pada tahun 2021, dalam bab ini membahas temuan dan data hasil penelitian yang telah dikumpulkan di lapangan. Baik secara langsung dari narasumber dan data yang didapatkan dari media cetak,

media sosial, ataupun laman resmi. Temuan tersebut akan dianalisis menggunakan teori e-government oleh Harvard JFK School of Government, yang mana menurut teori ini terdapat tiga aspek penting yang harus dimiliki dalam menerapkan konsep digitalisasi pada sektor publik, antara lain yaitu support (dukungan), capacity (kapasitas), dan value (nilai).

- **Dukungan (*Support*)**

Dukungan merupakan aspek yang memiliki peran penting dalam kesuksesan implementasi e-government. Dalam melakukan perubahan menuju e-government, diperlukan dukungan dari para pejabat publik untuk sukses, yang mana dalam kasus ini yaitu kerangka birokrasi yang mendukung terlaksananya e-government. Kerangka birokrasi yang dimaksud dalam kasus ini yaitu KSD (Kegiatan Strategis Daerah), seperti yang sudah dibahas sebelumnya di subbab 3.2, KSD merupakan sebuah program atau indikator capaian yang mendukung pencapaian Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur periode Tahun 2017 – 2022 Anies Baswedan –

Sandiaga Uno atau merupakan bagian dari RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) 2017-2022, dan tertuang setiap tahunnya di dalam RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah). Adapun di dalam KSD 2021 poin yang berkaitan dengan pengembangan kota cerdas atau smart city tertuang pada poin 3g, yang merupakan bagian dari Peningkatan Integritas Aparatur, salah satu dari 5 panca utama pembangunan pada RPJMD dan RKPD. Adapun dari ke-13 capaian yang harus dilaksanakan Jakarta Smart City pada poin 3g KSD tersebut, yang secara khusus membahas Aplikasi Jaki adalah capaian atau poin ke-1, ke-4, ke-6, ke-7, dan ke-9, dimana dalam kelima poin ini Jakarta Smart City harus memperkuat posisi Aplikasi Jaki sebagai sebuah super app yang dibuat untuk mengintegrasikan berbagai layanan publik di DKI Jakarta.

Walaupun konsep dari KSD dalam urusan pengembangan smart city ini bisa dibilang cukup bagus dan inovatif,

bertujuan meringankan birokrasi dengan mengintegrasikan berbagai layanan publik menjadi dalam satu aplikasi saja atau yang biasa disebut dengan pelayanan satu pintu, namun sayangnya dan ironisnya, pengembangan dan peningkatan kualitas Aplikasi Jaki ini juga menjadi tidak maksimal dikarenakan birokrasi itu sendiri. KSD yang menjadi prioritas dari tim pengembang Jakarta Smart City menyebabkan hal-hal yang masih membuat masyarakat tidak puas terhadap Aplikasi Jaki seperti UI/UX yang kurang memuaskan menjadi “urusan belakangan”, seperti yang diungkapkan Fidan Safira.

Banyaknya target KSD yang harus dicapai dalam setahun terutama dalam urusan integrasi pelayanan publik dari SKPD lain ke Aplikasi Jaki yang cukup menantang dibanding target-target lainnya, tentu saja membuat divisi pengembang Jakarta Smart City harus memprioritaskan target-target KSD tersebut, karena memang pada dasarnya Jakarta Smart

City merupakan lembaga pemerintahan, dan KSD bisa dibidang merupakan penjabaran kegiatan dalam mewujudkan program- program strategis pada periode kepemimpinan Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno pada 2017-2022. Hal ini menunjukkan adanya konflik kepentingan yang bersifat internal di lingkungan Pemprov DKI Jakarta, antara program KSD Pemprov DKI Jakarta yang bisa dibidang berbenturan dengan peningkatan kualitas aplikasi Jaki oleh Jakarta Smart City yang seharusnya diutamakan, mengingat hal ini berdampak terhadap kepuasan Masyarakat dalam menggunakan aplikasi ini. Hal ini juga menunjukkan kurang mendukungnya kerangka birokrasi e-government di DKI Jakarta, dimana Divisi Pengembang Jakarta Smart City harus memprioritaskan agenda pemerintah berupa KSD tersebut dibanding rekomendasi peningkatan kualitas Aplikasi Jaki oleh Divisi Analisa Produk, walau sifat rekomendasi tersebut dalam konteks

organisasi memang tidak memaksa. Adapun Fidan Safira juga menambahkan bahwa rekomendasi- rekomendasi tersebut akan tetap dibahas dan dilaksanakan, namun akan mulai dibahas setelah target integrasi KSD untuk RPJMD itu selesai.

- **Kapasitas (*Capacity*)**

Pembangunan E-Government yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal kepada masyarakat memerlukan capacity (kapasitas) dari organisasi atau institusi pemerintah yang memadai. Kapasitas ini terwujud kedalam sumber daya yang terbagi ke dalam tiga jenis, antara lain yaitu sumber daya finansial, infrastruktur informasi dan teknologi, serta sumber daya manusia yang kompeten. Setelah dibahas pada subbab 3.1 mengenai sumber daya finansial dan infrastruktur yang dimiliki Jakarta Smart City untuk mengembangkan Aplikasi Jaki maka pada subbab ini akan fokus untuk menganalisis

kecukupan sumber daya Jakarta Smart City dalam mengelola Aplikasi Jaki termasuk juga sumber daya manusianya yang belum dibahas sebelumnya. Dalam memenuhi sumber daya informasi dan teknologi, Jakarta Smart City tentu saja membutuhkan biaya atau sumber daya finansial yang tidak sedikit. Untuk sumber daya finansial nya sendiri, Jakarta Smart City mendapat jatah anggaran total sebesar Rp 396.436.214.008 untuk pengembangan Aplikasi Jaki yang terbagi ke dalam dua jenis belanja, yaitu belanja modal peralatan dan mesin dan belanja modal aset tetap lainnya.

Dengan sumber daya finansial yang cukup melimpah tersebut, tentu saja Jakarta Smart City mampu untuk membeli sumber daya infrastruktur teknologi yang mutakhir pula. Seperti yang sudah disebut diatas, banyak software dan hardware mutakhir yang dibeli oleh Jakarta Smart City untuk membantu pengembangan Aplikasi Jaki di tahun 2021.³³ Contohnya saja untuk software

Master Data Management dan juga hardware DCP sensor banjir, Jakarta merupakan salah satu Pemerintah Daerah pertama di Indonesia yang memiliki kedua perangkat ini.

Sedangkan untuk sumber daya manusia yang dimiliki Jakarta Smart City di tahun 2021, sudah diseleksi dengan ketat. Hal ini dinyatakan oleh Rika Zikriyyah selaku Kepala Satuan Pelaksana Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Jakarta Smart City dalam wawancara dengan Samsul Amri untuk penelitiannya, Rika menyatakan bahwa proses rekrutmen karyawan Jakarta Smart City cukup ketat karena memiliki tahapan seleksi mulai dari administrasi, psikotes, dan tes teknis yang dilakukan bidang-bidang yang membutuhkan SDM sehingga hanya orang-

orang yang profesional dan berkompeten sesuai dengan bidangnya lah yang diterima. Hal ini juga dapat dibuktikan berdasarkan temuan dalam penelitian ini pada subbab 3.2 sebelumnya, dimana dengan banyaknya capaian KSD (Kegiatan Strategis Daerah) di tahun 2021 terutama dalam pengembangan Aplikasi Jaki yang menantang, namun seluruhnya berhasil dicapai oleh Jakarta Smart City.

- **Manfaat (*Value*)**

Dalam konteks skripsi ini, nilai atau value JAKI didefinisikan sebagai nilai atau manfaat yang didapat masyarakat maupun pemerintah melalui aplikasi tersebut. Dalam menentukan value JAKI perlu untuk mengetahui pendapat masyarakat terhadap aplikasi tersebut. Setelah dikumpulkan dan dianalisisnya data sekunder yang berasal dari platform Google Play Store, terdapat 16

ulasan dengan like tertinggi yang dimpullkan mulai dari pertengahan tahun 2021 hingga tahun pertengahan tahun 2022. Dari 16 ulasan tersebut ada yang bersifat negatif maupun positif, dengan lebih banyaknya ulasan negatif dibanding positif oleh masyarakat terhadap Aplikasi Jaki, dimana sebagian besar dikarenakan kendala pada server aplikasi atau bug, dan juga tampilan atau interface aplikasi, contohnya seperti kesulitan untuk mencari fitur tertentu dikarenakan tidak ada kolom pencarian, atau bahkan ada juga WNA yang tidak bisa menggunakan aplikasi ini. Ketika berkunjung ke Jakarta, dikarenakan tidak ada opsi untuk mengganti setelan aplikasi ke Bahasa Inggris.

Adapun untuk value yang didapat pemerintah melalui Aplikasi Jaki, Pemprov DKI Jakarta juga mendapat value melalui Aplikasi Jaki ini, dimana pada 2021 DKI Jakarta menjadi provinsi pertama di Indonesia yang memenuhi target vaksinasinya, dimana Aplikasi Jaki juga berkontribusi

terhadap pencapaian ini dengan membantu sebanyak 840,5 ribu warga DKI Jakarta mendaftar vaksin secara daring selama tahun 2021.36 Walau ada value yang didapat oleh masyarakat dan Pemprov DKI Jakarta melalui Aplikasi Jaki khususnya dari sisi pendaftaran vaksin secara daring dimana lebih dari 800 ribu masyarakat terbantu untuk mendaftar vaksin secara daring dan turut berkontribusi menjadikan Jakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang dapat mencapai target vaksinasinya pada 2021. Tetapi di sisi lain banyak juga kalangan masyarakat yang tidak mampu mendapat value melalui Aplikasi Jaki, dikarenakan jaringan yang lambat dan banyak bug maupun *User Interface/User Experience* (UI/UX) yang kurang memuaskan bagi Masyarakat.

Guna memaksimalkan value yang didapat masyarakat maupun pemerintah melalui Aplikasi Jaki, pemerintah yang dalam kasus ini yaitu BLUD Jakarta Smart City harus terus dapat meningkatkan kualitas

Aplikasi Jaki itu sendiri, baik dari segi desain antarmuka bagi pengguna (UI) dan pengalaman pengguna (UX) Aplikasi Jaki maupun dari sisi kendala teknis yang dihadapi Masyarakat. Dengan meningkatnya kualitas Aplikasi Jaki sebagai super app pelayanan publik di DKI Jakarta, tentu saja value yang didapat Masyarakat dapat menjadi maksimal karena mereka dapat merasakan pelayanan publik yang berkualitas melalui Aplikasi Jaki. Dan bagi pemerintah, mereka juga bisa mendapatkan value melalui Aplikasi Jaki yang berkualitas, misalnya saja pada fitur JakLapor yang merupakan salah satu fitur paling populer pada Aplikasi Jaki dimana masyarakat dapat melaporkan permasalahan publik yang mereka temui secara daring. Dengan meningkatnya kualitas Aplikasi Jaki maka akan semakin banyak masyarakat yang melapor melalui JakLapor dan tentu saja akan semakin banyak feedback yang dapat diambil oleh pemerintah yang dapat juga menjadi bahan evaluasi guna

meningkatkan kinerja Pemprov DKI Jakarta.

4. Kesimpulan & Saran

- **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pemanfaatan alokasi APBD oleh Badan Layanan Umum Daerah Jakarta Smart City dalam pengembangan Aplikasi Jakarta kini selama masa pandemi pada tahun anggaran 2021, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Pemanfaatan Alokasi APBD Tahun anggaran 2021 dalam Pengembangan Aplikasi Jaki dianalisis berdasarkan teori digitalisasi sektor publik atau e-government Harvard JFK School of Government, dimana terdapat tiga aspek penting yang harus dimiliki dalam digitalisasi sektor publik, yaitu support (dukungan), capacity (kapasitas), dan value (manfaat). Dalam hal kapasitas, Jakarta Smart City memiliki sumber daya finansial dan sumber daya infrastruktur teknologi yang kuat serta sumber daya manusia yang

kompeten untuk mengembangkan Aplikasi Jaki. Namun, dalam aspek dukungan, dukungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam konteks birokrasi masih kurang, dimana pengembangan Jaki terpaksa memprioritaskan program Pemprov DKI Jakarta yaitu KSD (Kegiatan Strategis Daerah) yang merupakan indikator pencapaian Janji Kerja Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta periode Tahun 2017–2022 dan tertuang di RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) setiap tahunnya. Prioritas pengembangan berdasarkan KSD ini menghambat update aspek-aspek yang memang bisa meningkatkan kepuasan Masyarakat terhadap Jaki, karena memang KSD dalam pengembangan Jaki ini mengutamakan integrasi layanan publik dari instansi Pemerintah Daerah lainnya dibanding nilai kepuasan Masyarakat terhadap Jaki. Kurangnya dukungan

ini berdampak pada aspek

manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Meskipun sebagian masyarakat merasakan manfaat dari Aplikasi Jaki, banyak yang tidak merasakannya, yang terlihat dalam nilai pengguna Aplikasi Jaki di platform Google Playstore, yang memiliki rata-rata nilai 3.7 dari 5 dan banyak komentar negatif dari pengguna. Hal ini menunjukkan perlunya meningkatkan dukungan dan fokus pada peningkatan kepuasan pengguna agar manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dapat lebih maksimal.

- **Saran**

Sesuai dengan kesimpulan penelitian, diajukan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi pihak Pemprov DKI Jakarta, mulai dari Gubernur/Wakil Gubernur maupun Sekda DKI Jakarta, agar lebih melonggarkan pelaksanaan KSD bagi para OPD (Organisasi Perangkat Daerah) di DKI Jakarta sesuai dengan konteks maupun urgensi nya dalam

mewujudkan tujuan mereka yaitu melayani masyarakat. Contohnya seperti yang terjadi pada BLUD Jakarta Smart City, dimana dalam pengembangan Aplikasi Jaki, tim pengembang lebih memprioritaskan banyak sekali integrasi fitur-fitur ke dalam Aplikasi Jaki berdasarkan KSD dibanding hal-hal yang lebih mendasar bagi Aplikasi Jaki yang dapat meningkatkan kepuasan Masyarakat pengguna Jaki, misalnya seperti desain antarmuka atau fungsionalitas fitur yang lebih mudah dan memuaskan bagi masyarakat.

2. Bagi pihak Jakarta Smart City, Diskominfo DKI Jakarta, maupun PPID Pemprov DKI Jakarta agar lebih terbuka terhadap informasi mengenai pemanfaatan alokasi APBD di DKI Jakarta, karena masyarakat luas seharusnya memiliki hak untuk dapat mengakses informasi mengenai anggaran

tersebut. Walaupun dalam konteks penelitian ini data mengenai pemanfaatan anggaran pada klasifikasi Belanja Barang & Jasa di Jakarta Smart City pada akhirnya tidak relevan dengan tujuan penelitian untuk menganalisis pemanfaatan alokasi APBD dalam pengembangan

Aplikasi Jaki, namun pada kasus lain, hal ini justru dapat menjadi bumerang dan menimbulkan kecurigaan bagi masyarakat mengenai seberapa “bersih” pemanfaatan anggaran tersebut karena informasi mengenai yang terlalu sulit untuk diakses.

Daftar Pustaka

Buku & Jurnal

- Amri, Samsul. 2022. Efektivitas Aplikasi Jaki sebagai Media Informasi Covid-19 di Jakarta pada Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta. Retrieved from Repository IPDN: <https://eprints.ipdn.ac.id/9981/1/REPOSITORY%20SAMSUL%20%282%29.pdf>
- Badan Pusat Statistik DKI Jakarta. 2021, 74. Provinsi DKI Jakarta dalam Angka 2021, Jakarta: BPS Provinsi DKI Jakarta.
- Denhardt, Janet Valerie and Denhardt, Robert B. 2003. *The New Public Service: Serving Not Steering (page 61)*, New York: ME Sharpe Inc.

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, Jakarta: Alfabeta.

Taryana, dkk. Analisis Kesiapsiagaan Bencana Banjir di Jakarta, *Jurnal Administrasi Negara Unpad* Vol. 13 No. 2 (2022), 302 - 311

Zulhakim. A. Aziz. 2012. Mengenal E-Government: Pemahaman Konsep Aplikasi E-Government sebagai Pelayanan Publik (hal. 60), Bengkulu: Fisipol Unihaz.

Peraturan

Instruksi Sekretaris Daerah DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyusunan Rencana Aksi Percepatan KSD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2021.

Instruksi Gubernur DKI Jakarta Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Isu Prioritas Daerah Tahun 2021-2022.

Dokumen

Pemprov DKI Jakarta. 2021. APBD DKI Jakarta 2021, Jakarta. Retrieved from website APBD DKI Jakarta:
<https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/d>

Pemprov DKI Jakarta. 2021. LKPD DKI Jakarta 2021, Jakarta. Retrieved from website PPID DKI Jakarta:
<https://ppid.jakarta.go.id/laporan-keuangan-pemerintah-daerah>

Pemprov DKI Jakarta. 2021. RKPD DKI Jakarta 2021, Jakarta. Retrieved from website APBD DKI Jakarta:
<https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc>

Pemprov DKI Jakarta. 2017. RPJMD DKI Jakarta 2017 – 2022. Retrieved from website APBD DKI Jakarta:
<https://apbd.jakarta.go.id/landingpage/doc>

Internet

- Angelia, Diva. 2022. "Optimasi Layanan Digital Melalui Integrasi Data", Jakarta: Good News From Indonesia (GNFI).
<https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/02/04/optimasi-layanan-digital-melalui-integrasi-data>
- Diskominfo DKI Jakarta. 2022. Dashboard Cakupan Vaksinasi Fasilitas Kesehatan di Kecamatan.
<https://corona.jakarta.go.id/id/peta-vaksinasi-kecamatan>.
- Jakarta Smart City. 2022. Jakarta Kini App, Jakarta.
<https://jaki.jakarta.go.id/id/> Jakarta Smart City. 2022. 6 Januari.
#KilasBalikJaki2021 [Instagram Post].
https://www.instagram.com/p/CYYm5v3Fcqw/?img_index=2